REKONSTRUKSI MASKULINITAS

Dinamika gender setelah konflik di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro Mindanao

SASAKAWA PEACE FOUNDATION

INTEGRAL KNOWLEDGE ASIA

CONCILIATION RESOURCES

Kenapa riset ini penting?

Bagaimana riset ini dilakukan?

1. Kualitatif dan kuantitatif, 6000 responden (laki-laki dan perempuan) -- tahun 2021-2023

2. Kolaboratif: tim peneliti lokal (kampus, organisasi akar rumput, dan enumerator)

3. Pendekatan transformatif gender: **interseksional, sistem kompleks, dekolonial**

1. struktur dan kultur

Maskulinitas: sifatnya kompleks dan telah bergeser

Terhambatnya transformasi gender yang lebih luas

Norma gender yang tidak setara dan ketimpangan struktural: bertahan

Temuan 1

Maskulinitas bersifat kompleks dan telah bergeser, tetapi norma ketidaksetaraan gender dan ketimpangan struktural tetap ada dan mencegah transformasi norma gender yang lebih luas setelah konflik.

2. ranah domestik dan komunitas

Ranah domestik dan komunitas kerap luput dalam pembuatan kebijakan dan pembangunan damai

Renegosiasi kerja domestik: titik masuk penting untuk menggeser ketidaksetaraan gender

Keluarga, lembaga agama dan adat yang penting dalam konstruksi gender dan maskulinitas: terabaikan

Temuan 2

Keluarga, lembaga keagamaan dan adat merupakan ranah yang penting namun terabaikan yang memengaruhi maskulinitas dan mengubah ketidaksetaraan gender setelah konflik.

3. kesehatan mental

Keterbatasan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial

Banyak permintaan atas layanan pemulihan trauma

Kurangnya dukungan untuk mengatasi warisan trauma akibat konflik

Temuan 3

Trauma terkait konflik membentuk dukungan laki-laki dan perempuan terhadap kekerasan dan sementara ketersediaan *trauma healing* dan dukungan kesehatan mental dan psikososial terbatas, terdapat banyak permintaan terkait layanan ini.

4. pengakuan vs pembatasan

Walau perempuan bekerja, mereka tetap memikul beban ganda dan pembatasan berlapis

Pengakuan atas peran perempuan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan

Pembatasan bagi perempuan lewat struktur tradisional dan kontrol ekonomi-politik

Temuan 4

Kesempatan perempuan dibatasi oleh kebutuhan laki-laki untuk mempertahankan struktur keluarga yang tradisional dan mengendalikan ekonomi dan pengambilan keputusan.

5: kontribusi yang terbelenggu

Perempuan berkontribusi penting bagi pembangunan damai: peran gender telah bergeser

Terhambatnya upaya menyebar pengaruh dan persepsi tentang kepemimpinan perempuan

Anggapan umum bahwa laki-laki lebih pantas dan layak berada di kekuasaan yang terlihat (publik)

Temuan 5

Perempuan telah melakukan kontribusi penting terhadap perdamaian, tetapi hal ini tidak diikuti oleh upaya untuk menyebarkan pengaruh atau mengubah persepsi mengenai kepemimpinan mereka. Namun, di beberapa ruang, peranan gender sudah bergeser.

6: rekonstruksi pascakonflik

Stabilitas politik dan keamanan, pembangunan infrastruktur

Terpinggirnya kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi yang responsif gender

Pembagian '*peace dividend*', isu keadilan transisi, krisis ekosistem

Temuan 6

Rekonstruksi dan tata kelola pascakonflik mengutamakan kepentingan elite, laki-laki, dan militer dalam hal keamanan, stabilitas politik, dan infrastruktur dengan mengorbankan pengembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang responsif gender.

GAMBAR 1: KONTINUM KEKERASAN

6 INTERVENSI UNTUK TRANSFORMASI

GAMBAR 1: KONTINUM KEKERASAN

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Internasional

1. Bermitra dan berinvestasi langsung, dipimpin secara lokal dan responsif gender
2. Maskulinitas dalam WPS + pembangunan damai -> Tingkat keluarga dan masyarakat
3. Memiliki mekanisme, program, dan SDM yang merespon trauma dan kekerasan akibat konflik di berbagai lapisan masyarakat

Peneliti (universitas & lembaga riset)

1. Mendukung lembaga riset di Selatan global untuk mengembangkan kapasitas akademik dan memimpin rancangan pengembangan pengetahuan
2. Kolaborasi formal lembaga riset Utara global dan Selatan global yang peka pada konteks sejarah, budaya, ekopol
3. Investasi di riset yang membangun narasi alternatif feminis, dekolonial terhadap konflik dan pembangunan damai

Nasional: pembuat kebijakan

1. Komitmen terhadap keadilan sosial, inklusivitas sosial, dan responsif gender dalam UU dan perda
2. Pengakuan dan mekanisme pemulihan trauma akibat konflik
3. Mendukung dan memfasilitasi kerja-kerja perdamaian perempuan & kelompok akar rumput di pengambilan keputusan nasional
4. Pencegahan kekerasan seksual: perkuat kapasitas pemerintah dan layanan lokal, berbasis kebutuhan korban

Terima kasih

Rizki Amalia Affiat

r.affiat@ik-asia.org
E0306176@u.nus.edu